

PERENCANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT (STUDI PADA PELATIHAN KERJA MANDIRI)

¹Ichsan Setyadharna; ²Heru Nurasa; ³Nina Karlina

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail : ichsansetyadharna48@gmail.com; hnurasa@yahoo.com; karlina_nina@yahoo.com

ABSTRACT

This research is about the Planning of Workforce Quality and Productivity Improvement Program at the Manpower and Transmigration Office of West Java Province. The background of this study is that West Java has the highest population in Indonesia and has a big challenge to overcome unemployment. In the target of the Workforce Quality and Productivity Improvement Program there are still targets that have not yet been achieved, this study seeks to find out how the planning of the Workforce Quality and Productivity Improvement Program. This research used James A.F Stoner planning steps that have 4 steps, namely setting goals or set of goals, defining the current situation, identifying things that help and hinder goals and develop plans or tools of action to achieve goals. This research used qualitative research by doing observations, interviews and analysis document as data collection techniques.

Keywords: *Planning, Programs, Quality Improvement and Labor Productivity*

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Perencanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Latar belakang penelitian ini Jawa Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia dan memiliki tantangan yang besar untuk mengatasi jumlah pengangguran. Dalam target Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja masih terdapat target yang belum tercapai, penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana perencanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah perencanaan James. A.F. Stoner yang memiliki 4 langkah yaitu tetapkan tujuan atau seperangkat tujuan, definisikan situasi saat ini, identifikasikan hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan-tujuan dan kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

Kata Kunci : Perencanaan, Program, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

PENDAHULUAN

Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat mencapai angka 43.053.732 jiwa, hampir 20% penduduk Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mempersiapkan perencanaan yang baik dalam mengelola dan meningkatkan Masyarakat yang

berkualitas, baik dengan adanya program-program maupun kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai pengelolaan dan peningkatan masyarakat yang berkualitas tersebut. Pengangguran adalah penduduk angkatan kerja yang belum bekerja, sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah persentase pengangguran terhadap Angkatan kerja. Dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak Jawa Barat tidak lepas dari masalah pengangguran. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”. Artinya tidak ada satupun warga Negara Indonesia yang tidak berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat tahun 2017 mencapai angka 8,22% jauh di atas rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional yang hanya sebesar 5,33% (BPS Tahun 2017). Pengangguran rata-rata ada pada lulusan SMTA (Sekolah Menengah Tingkat Atas), SMTP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama), SD (Sekolah dasar). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.1 Penganggur Terbuka di Provinsi Jawa Barat menurut Pendidikan

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
≤SD	631.113	627.620	628.732	444.057	427.631	497.627	379.235
SMTP	494.091	509.412	521.336	449.824	405.268	399.038	398.103
SMTA Umum	403.558	353.542	369.179	465.742	425.879	415.290	374.493
SMTA Kejuruan	231.436	254.232	278.934	329.830	398.682	409.897	513.496
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	57.037	34.852	31.083	32.935	48.456	62.738	64.540
SARJANA	84.608	49.328	59.403	52.808	88.958	89.271	109.561
JUMLAH	1.901.843	1.828.986	1.888.667	1.775.196	1.794.874	1.873.861	1.839.428

(Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2017, diolah Pusdatinaker)

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa angka pengangguran rata-rata didominasi oleh tingkat SMTA ke bawah dan angka pengangguran yang ada di Jawa Barat dari tahun 2011-2017 bersifat fluktuatif. SMTA merupakan

sekolah menengah dengan jenis pendidikan yang bersifat umum, belum diarahkan ke arah yang lebih spesifik atau skill tertentu agar dapat bersaing mencari pekerjaan. Lulusan SMTA dirasa belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Oleh karena itu, untuk memberikan pembekalan terhadap masyarakat yang belum memiliki kompetensi atau kemampuan bersaing di dunia kerja maka perlu diadakan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan melakukan pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut bertujuan agar SDM memiliki daya saing yang cukup tinggi dan dapat mengurangi permasalahan mengenai tingginya angka pengangguran. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No.11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah, bahwa Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global, sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 persaingan dalam dunia kerja semakin jelas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja menjadi faktor yang penting bagi masyarakat agar lebih mudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, disebutkan misi yang pertama ialah “meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja”. Hal tersebut untuk menciptakan tenaga kerja Jawa Barat sebagai motor penggerak perekonomian serta mampu bersaing secara regional maupun nasional. Maka untuk melakukan upaya tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan mengadakan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini merupakan pelatihan bagi tenaga kerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi agar dapat bersaing di dunia kerja dengan tujuan, strategi, dan kebijakan sebagai berikut:

Bagan 1.1 Tujuan, Strategi, Kebijakan Dalam Misi Meningkatkan Kualitas dan

Tujuan	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Memberikan fasilitas bagi peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja

(Sumber: Diolah dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 2013-2018)

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 poin ke-9 menjelaskan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan kerja bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, dalam hal ini mengunjungi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, wawancara awal dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan data-data yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menemukan beberapa indikasi masalah, yaitu :

Belum tercapainya targetan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengenai Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ini pada tahun 2015-2017, bisa dilihat dari tabel 1.2 yang sudah dipaparkan sebelumnya memperlihatkan bahwa

masih banyaknya indikator-indikator kinerja yang belum tercapai yaitu seperti indikator tentang persentase pencari kerja yang terdaftar memiliki sertifikasi pelatihan pada tahun 2015 yaitu memiliki target 4.674 Orang dengan realisasi 3.447 Orang, tahun 2016 target sebesar 5.344 Orang dengan realisasi sebesar 3.114 Orang, dan tahun 2017 target sebesar 5.481 Orang dengan realisasi sebesar 2.370 Orang, lalu indikator persentase pencari kerja yang terdaftar memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2015 yaitu memiliki target 657 Orang dengan realisasi 471 orang, , tahun 2016 target sebesar 720 Orang dengan realisasi sebesar 462 Orang, dan tahun 2017 target sebesar 755 dengan realisasi sebesar 513 Orang., lalu indikator yang terakhir yaitu menciptakan wirausaha baru tidak tercapai pada tahun 2016 target sebesar 1000 Orang dengan realisasi sebesar 640 Orang dan 2017 target sebesar 1000 Orang dengan realisasi sebesar 280 Orang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang merupakan sebuah pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan serta tepat digunakan dalam penelitian dengan kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), sehingga tidak tergantung pada hasil perhitungan statistika maupun lainnya. Dimana menurut Creswell dalam bukunya *Research and Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Cresswell, 2010 : 4). Dimana penelitian ini diarahkan untuk memahami suatu fenomena sosial.

Dengan metode ini, penulis mengungkapkan makna secara mendalam dari situasi sosial yang terjadi di lapangan dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar melalui sebuah tulisan. Bentuk gambaran situasi sosial tersebut, dipaparkan oleh peneliti melalui tulisan

mengenai Perencanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Studi Pada Pelatihan Kerja Mandiri).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat tahun 2013-2018, tujuan strategis tersebut telah ditetapkan indikator-indikator capaiannya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kualitas tenaga	1. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan sebesar 3,48% 2. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 0.65%
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1. Persentase Serapan Tenaga Kerja sebesar 88,97%, 2. Jumlah wirausaha baru sebanyak 6.000 orang
3	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial pada sebesar 75 %,
4	Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	1. Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja sebesar 31,45% 2. Persentase fasilitasi penyelesaian kasus CTKI dan TKI sebesar 35%.
5	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 16,03 %
6	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigran	Jumlah keluarga calon transmigran yang telah dilatih sebanyak 1.280 jiwa

(Sumber: Diolah dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja termasuk ke dalam indikator kinerja dimana berkaitan erat dengan tujuan dan sasaran yaitu meningkatnya kualitas tenaga kerja dan meningkatnya penempatan tenaga kerja.

Berdasarkan penjabaran diatas, jadi tujuan dari perencanaan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja merupakan tujuan dari kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang dijadikan acuan yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transimgrasi Provinsi Jawa Barat.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja tentunya memiliki tanggung jawab terhadap Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sedangkan UPTD. Balai Pelatihan Kerja Mandiri memiliki tugas untuk melaksanakan, untuk kelancaran dalam merencanakan ataupun menjalankan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja maka diperlukan komunikasi yang baik dari pihak pelaksana dengan stakeholder-stakeholder yang terkait atau bisa dikatakan juga berkoordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, penulis melakukan triangulasi terhadap semua informan, bahwa semua informan mengatakan hal yang sama mengenai komunikasi ini yaitu komunikasi atau koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan pihak-

pihak yang terkait seperti Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pelatihan Kerja, UPTD, Balai Pelatihan Kerja Mandiri, dan lainnya sudah baik dengan melalui rapat-rapat rutin yang diadakan atau forum perangkat daerah itu sendiri.

Sosialisasi ialah suatu bagian yang penting untuk mencapai keberhasilan suatu program. Dimana sosialisasi ini berguna agar program yang akan dilaksanakan tersebut tersampaikan dengan baik dan dapat mudah dimengerti oleh semua pihak. Pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas ini sosialisasi merupakan hal yang terpenting terutama kepada para calon peserta atau masyarakat yang ingin mengikuti program ini, bila sosialisai mengenai progam ini sudah dilaksanakan dengan baik maka akan mempermudah untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, sosialisasi yang dilakukan mengenai Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja ini masih belum baik, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program ini. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target-target seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda yaitu masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Program Peningkatan dan Kualitas Tenaga Kerja ini, dengan itu menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai hal-hal yang menghambat Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam pencapaian targetnya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa informan-informan tersebut, yaitu seperti belum terpenuhinya sumber daya manusia yang ada, rendahnya kualitas tingkat pengangguran yang didominasi oleh lulusan SMA ke bawah, dan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan sebelum berjalannya Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ini.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengembangkan rencana kembali dengan menyusun kebijakan yang berkaitan

dengan strategi tersebut sebagaimana dengan yang ada di Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing,
2. Memberikan fasilitasi perluasan kesempatan kerja, penempatan kerja (baik di dalam maupun di luar negeri), penciptaan wirausaha baru dan pembinaan purna-kerja,
3. Menyelesaikan kasus hubungan industrial secara cepat, tepat dan berkeadilan,
4. Memberikan fasilitasi kepada pekerja/buruh dalam rangka mencapai kesejahteraan,
5. Memberikan fasilitasi bagi pengawasan yang lebih intensif terhadap tenaga kerja,
6. Meningkatkan peran pekerja dan pengusaha dalam mewujudkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja,
7. Mendorong penyelenggaraan kerjasama antara daerah pengirim dengan daerah penempatan,
8. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi melalui pelatihan yang efektif.

Melihat pengembangan rencana dan alternatif tindakan dalam bentuk strategi dan kebijakan mengenai ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ada pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat seperti yang sudah diuraikan tersebut, dapat terlihat bahwa dinas sudah merencanakan mengenai alternatif-alternatif tindakan maupun mengembangkan rencana agar mempermudah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya meskipun dalam targetan tiga tahun

terakhir Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ini masih banyak yang belum tercapai.

Dalam Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja terdapat pula pengembangan rencana dan perangkat tindakan

yang sudah direncanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa barat mulai dari sasaran, indikator sasaran, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2015		2016		2017			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 0,56%	0,53	4.128	0,53	5735	0,57	5.875	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat
	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi		Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 3,48%	3,77	9.660	3,93	10.777	3,63	12.060		
	Jumlah Wirausaha baru		Jumlah Wirausaha baru sebanyak 6000 orang	1.850	2.981	1.000	4.694	1.000	5.866		

Berdasarkan tabel 4.5 sebelumnya, dapat dilihat bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dalam hal mengembangkan rencana atau perangkat tindakan khususnya dalam Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sudah ada seperti yang tertera dalam tabel 4.5, pengembangan rencana dan perangkat tindakan ini dimulai dari sasaran, lalu indikator sasaran, lalu program atau kegiatan, lalu indikator kinerja kegiatan, dan targetan maupun kerangka

pendanaan ini bisa dilihat pada tabel 4.5 tersebut yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pengembangan rencana yang sudah dilakukan tersebut bisa dibilang baik meskipun dalam pelaksanaannya ada target-target yang belum tercapai seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Perencanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat penulis menyimpulkan bahwa perencanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja belum optimal dikarenakan dari empat tahap atau langkah perencanaan yang dikemukakan Stoner masih terdapat dua langkah perencanaan yang belum sesuai.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis lakukan dan paparkan, ada terdapat beberapa hal yang akan penulis sarankan mengenai Perencanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagai pengelolaan perencanaan perlu mendalami tentang potensi-potensi baru yang tersedia pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan mengadakan Forum Perangkat Daerah minimal dua kali dalam satu bulan sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam menjalankan dan mencapai tujuan programnya.
2. Perlu adanya penambahan instruktur pelatihan pada UPTD. Balai Pelatihan Kerja Mandiri untuk menutupi kekurangan sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ini.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang termasuk di dalamnya terdapat UPTD. Balai Pelatihan Kerja Mandiri perlu meningkatkan sosialisasi atau melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat baik itu langsung mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah atau

melalui media massa hal ini dikarenakan pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Grasindo
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Kurniawan. Dhani. 2014. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Demak: Univesitas Sultan Fatah Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, Ulbert. 1989. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sodang P. 2003. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sukmadi. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Humaniora
- Stoner, James A.F. 1996. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga

Dokumen-Dokumen

- Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
- LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Latihan Kerja Nasional
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Penelitian Terdahulu

Ahmad, Arwani. 2014. Balai Latihan Kerja Industri (Studi Kasus Tentang Peran BLKI Samarinda Dalam Meningkatkan Kualitas Peserta Pelatihan Kerja Industri). Pdf. (<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id> diakses pada tanggal 22 maret 2017)

Solchan. Mochamad. 2007. Manajemen Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Semarang. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Lubis, Adnan Rizki. 2015. Kinerja Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kota Tangerang. Program Studi Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sumber Lain

<http://disnakertrans.jabarprov.go.id/>
<http://balatrans.disnakertrans.jabarprov.go.id/>